



**JEMBA: Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting**

Journal Homepage: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jemba/index>

---

***Pengaruh Perencanaan Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bandung)***

***Inta Budi Setyanusa<sup>1</sup>, Ummi Ghoidah Mutmainnah<sup>2</sup>***

<sup>1</sup> Universitas Komputer Indonesia, [inta.budi@email.unikom.ac.id](mailto:inta.budi@email.unikom.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Komputer Indonesia, [ummigm15@gmail.com](mailto:ummigm15@gmail.com)

---

**INFO ARTIKEL**

Riwayat Artikel

Received :05-12-2022

Revised :07-12-2022

Accepted :10-12-2022

**Keywords :**

***Planning,  
Performance-  
Based Budgeting  
and Performance  
Accountability***

**ABSTRACT**

*Performance Accountability, there are still problems related to Performance-Based Planning and Budgeting. Among them are that planning still has not reached the target, therefore there is still a need for much improvement and there are still mistakes from government officials that the success and failure of programs and activities carried out only based on absorption of performance-based budgets causes the results of the evaluation of the performance accountability system of government agencies to still rank Lowest. This study aims to determine how much influence Planning has on Performance Accountability. And to find out how much influence Performance-Based Budgeting has on Performance Accountability. The method used in this research is descriptive and verification method with a quantitative approach. The population in this study were 50 employees who work at the Development Planning, Research and Regional Development Agency of Bandung Regency. The sample in this study used a saturated sample with a total sample of 50 respondents. The data analysis method used in this study is the SPSS 23 method. The results of this study indicate that Performance-Based Planning and Budgeting has a significant positive effect on Performance Accountability at the Regional Development Planning, Research and Development Agency of Bandung Regency.*

## ABSTRAK

**Kata Kunci :**  
**Perencanaan,**  
**Anggaran**  
**Berbasis Kinerja**  
**dan**  
**Akuntabilitas**  
**Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja masih terdapat permasalahan terkait Perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja. Diantaranya yaitu terdapat Perencanaan masih belum mencapai target, maka dari itu masih perlu banyak perbaikan serta masih ada kekeliruan dari aparat pemerintah bahwa keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan hanya berdasarkan penyerapan anggaran berbasis kinerja menyebabkan hasil dari evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih menempati peringkat terendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Perencanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas kinerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang pegawai yang bekerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh dengan total sampel 50 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung.

---

## 1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu poin termasuk dalam landasan hukum atau aturan organisasi. Butuh organisasi yang diwajibkan untuk memenuhi akuntabilitas organisasi dengan kinerja yang dicapai. Kinerja organisasi dapat dicapai dengan mengefektifkan dan mengefensiensikan hasil proses organisasi. Proses tersebut yaitu perencanaan, penganggaran, dan lain-lain (Isnanto, Suharno & Widarno, 2019). Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja sektor publik, perlu dilakukannya evaluasi dan mengukur kinerja organisasi secara berkelanjutan. Bentuk penilaian dan pengukuran kinerja pemerintah dapat dicapai melalui penilaian Akuntabilitas Kinerja (Anggini, Rosidi & Andayani, 2021).

Berdasarkan fenomena yang tertulis pada LKIP BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung tahun 2021 menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti, dikarenakan hasil pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.

Perencanaan kerja tahunan terhadap penilaian evaluasi LAKIP merupakan kegiatan merumuskan program-program kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ke depan dan penilaian yang dilakukan untuk melihat hasil ketercapaian pelaksanaan rencana kerja tahunan. Penyusunan perencanaan kinerja yang tertuang dalam LAKIP perlu dilakukan evaluasi dan penilaian supaya ke depannya pelaksanaan dapat diperbaiki, sehingga pencapaian perencanaan kinerja yang ditetapkan dapat lebih maksimal dan optimal (Riana Mayasari, 2021:29). Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil (Yeti dan Bambang, 2020:155).

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), M. Yusuf Ateh (2018) mengatakan bahwa pemerintah terus berusaha mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh instansi pemerintah. Hal itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi anggaran berbasis kinerja. Untuk mewujudkan efisiensi, bukan semata-mata memotong anggaran, tapi juga harus anggaran berbasis kinerja. Dimulai dengan memperbaiki pola penganggaran.

Anggaran berbasis kinerja membutuhkan kesesuaian dan kejelasan tujuan dan sasaran yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan pemerintah. Pendekatan anggaran berbasis kinerja ini memberikan kinerja pemerintah yang lebih jelas dan hasil atau keuntungan yang terukur (Anggraeni & Saleh, 2020). Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan pemerintah, sehingga dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan secara optimal (Ginanjari, dkk 2019).

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil judul “Pengaruh Perencanaan Dan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bandung)”.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang, maka penelitian merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu 1) Seberapa besar pengaruh Perencanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja. 2) Seberapa besar pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Maksud dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris terkait Pengaruh Perencanaan Dan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris guna memecahkan masalah.

Sesuai dengan fokus penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian di antaranya yaitu, 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### **Perencanaan**

Menurut Bambang & Roedjinandari (2017:3) Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang terdiri dari 4 fungsi utama. Manajemen perencanaan (fungsi perencanaan), Pengorganisasian (fungsi pengorganisasian), Pengarahan (pengarahan) dan pengendalian (pengendalian), sehingga perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak untuk menerapkan manajemen yang baik, dan Untuk membuat rencana yang baik harus hati-hati memikirkan terlebih dahulu tindakan yang akan dilakukan nantinya. Ini berarti bisa melakukan perencanaan yang baik sehingga kita bisa melihat jauh ke depan.

Sedangkan menurut Kusno Hadiutomo (2021:35-36) Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting. Di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi atau perusahaan, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi atau perusahaan. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi atau perusahaan terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

### **Anggaran Berbasis Kinerja**

Menurut Arifin, dkk (2022:26) penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Definisi tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap alokasi dana harus dapat diukur capaian output/outcome (keluaran/hasil) yang hendak ingin dicapai dari input (masukan) yang ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Jan Hoesada (2022:589) Anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu elemen reformasi keuangan yang paling mendasar di Republik Indonesia. Anggaran berbasis kinerja dimulai dengan penetapan visi entitas, sasaran jangka panjang, menengah, dan pendek (tahunan), kinerja jangka pendek (tahunan), penetapan keluaran atau target hasil (tahunan) yang dirinci menjadi kinerja tahunan kegiatan utama sesuai tupoksi, proyek dan program utama entitas tersebut.

### **Akuntabilitas Kinerja**

Menurut Rusdiana & Nasihudin (2021:41) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara variabel. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sedangkan menurut Riana Mayasari (2021:21) Akuntabilitas kinerja merupakan jenis tanggung jawab pemerintah untuk program dan kegiatan yang telah diselesaikan.

Proses untuk mencapai tata kelola yang efektif, perlu akuntabilitas kinerja diterapkan. Akuntabilitas kinerja yang baik tidak dapat dipisahkan dari ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Pencapaian variabel kinerja yang telah ditetapkan menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah.

### **Kerangka Pemikiran**

#### **Pengaruh Perencanaan Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Sesuai dengan konsep yang dinyatakan oleh Caroline (2019:154) yang menyatakan hubungan antara Perencanaan dan akuntabilitas kinerja bahwa Akuntabilitas kinerja juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi.

Nursadi (2019:145) menyatakan bahwa Pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan sumber daya manusia aparatur perencanaan baik pusat maupun daerah, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, penilaian capaian Indikator Kinerja Utama menggambarkan capaian indikator outcome.

Menurut Winara dan Putri (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Kemudian yang dilakukan penelitian Syuliswati dan Asdani (2017) secara simultan faktor perencanaan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Selanjutnya penelitian ini juga didukung oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Cahya Budi (2020) hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perencanaan program dan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.

#### **Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Sesuai dengan konsep yang dinyatakan Pandapotan Ritonga (2021:120-121) yang mengatakan hubungan antara anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja mendukung tujuan dan kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja yang membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Akuntabilitas kinerja memperkenalkan sistem pembuatan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan membuat rencana kerja dan anggaran dapat memenuhi kebutuhan anggaran berbasis kinerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja.

Jaelani M (2017:42) menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka seharusnya laporan terealisasi perhitungan APBD dilengkapi dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) sesuai dengan Inpres 7 tahun 1999. Dengan keterbatasan kompetensi DPRD untuk menilai kinerja laporan keuangan tersebut,

DPRD dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dengan melakukan sinergi dengan pengawasan lain yang terkait untuk melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Selain itu, dukungan staf tenaga ahli dapat dioptimalkan untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah melalui LKPJ tersebut.

Menurut Wardani dan Silvia (2020) menyatakan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dengan menunjukkan hasil koefisien determinasi sebesar 63,4% sedangkan sisanya sebesar 36,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabeln lain. Kemudian peneliti yang dilakukan oleh Suhendar, Sari dan Nofitri (2021) sehingga dapat diartikan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya penelitian ini juga didukung oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Silvia (2021) berdasarkan hasil telah dipresentasikan anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LPMP Provinsi Lampung.

### **Hipotesis**

Berdasarkan dari uraian kerangka pemikiran diatas, dengan itu penelitian melakukan hipotesis sebagai berikut: H1: Perencanaan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. H2: Anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

### **3. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan hubungan antar variable yaitu, variable Perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2017:147) metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiyono (2017:36) Analisis verifikatif adalah metode penelitian digunakan untuk mengetahui dan menguji data dengan menggunakan perhitungan statistik untuk menjawab rumusan masalah.

Dalam metode penelitian ini disimpulkan bahwa metode yang diperoleh untuk membuat hipotesis dengan dilakukanya observasi dan pengamatan sistematis tambahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, yaitu dengan hasil penelitian yang akan diolah dan diambil kesimpulan apakah perencanaan dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer.

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 pegawai yang terdaftar di BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung dan penelitian Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

### Metode Uji Data

Metode uji data penelitian menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas. Dimana uji Validitas digunakan untuk menguji ke validitasan dari item-item pernyataan pada kuesioner, apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak. Sedangkan untuk Uji Reliabilitas ini dilakukan pada responden sebanyak 50 pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung, dengan menggunakan pertanyaan yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas dan akan ditentukan reliabilitasnya.

### Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana pengaruh perencanaan dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik terdiri dari Analisis Regresi Linear Berganda, Analisis Koefisien Korelasi Pearson, Analisis Koefisien Determinasi, Analisis Koefisien Korelasi Uji T dengan menggunakan alat uji *software* SPSS *Statistic* versi 23.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Suatu alat ukur dikatakan valid jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  0,259

**Table 1. Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas**

Variabel	No. Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Perencanaan (X1)	1	0.578	0.259	Valid
	2	0.708	0.259	Valid
	3	0.779	0.259	Valid
	4	0.507	0.259	Valid
	5	0.458	0.259	Valid
Anggaran Berbasis	1	0.540	0.259	Valid
	2	0.597	0.259	Valid

Kinerja (X2)	3	0.647	0.259	<i>Valid</i>
	4	0.664	0.259	<i>Valid</i>
	5	0.658	0.259	<i>Valid</i>
Akuntabilitas Kinerja (Y)	1	0.768	0.259	<i>Valid</i>
	2	0.806	0.259	<i>Valid</i>
	3	0.721	0.259	<i>Valid</i>

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Pada table 1 dapat dilihat seluruh butir pernyataan yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel memiliki  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari  $r_{tabel}$  yang sudah ditentukan yaitu 0,259 ( $>0,259$ ), sehingga hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan perencanaan, anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja dinyatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Cronbach's Alpha. Apabila koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,6 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan reliable.

**Table 2. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner**

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Keterangan	Kriteria
Perencanaan	0.605	0.6	Reliabel	Good
Anggaran Berbasis Kinerja	0.610	0.6	Reliabel	Good
Akuntabilitas Kinerja	0.649	0.6	Reliabel	Good

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Berdasarkan table 2 tersebut diketahui bahwa nilai reliabilitas butir pernyataan pada kuesioner seluruh variabel yaitu perencanaan, anggaran berbasis kinerja, dan akuntabilitas kinerja yang sedang diteliti lebih besar dari 0,6 hasil ini menunjukkan bahwa butir-butir disetiap pernyataan pada kuesioner andal untuk mengukur variabelnya.

### Analisis Deskriptif

#### Tanggapan Responden Mengenai Perencanaan

Variable Perencanaan diukur dengan menggunakan 5 indikator dan dioperasionalkan menjadi 5 pernyataan yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Indikator yang diukur terdiri dari, Tujuan Yang Ingin Dicapai, Jangka Waktu Tertentu Untuk Mencapai Tujuan, Senantiasa Dihubungkan Antara Berbagai Permasalahan Dengan Berbagai Sumber Daya Yang Dimiliki, Kebijakan Yang Terbaik Untuk Merealisasikan Tujuan, Perencanaan Mengandung Program, Kegiatan Dan Usaha-Usaha Yang Nyata.

Secara keseluruhan tanggapan responden tentang perencanaan diperoleh total skor aktual sebesar 1026 (79%). Namun masih ada sebagian yang masih kurang optimal dalam



menyusun perencanaan kerja dan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman atas dasar rencana belum dapat menilai hasil realisasi sebuah tujuan, hal ini terbukti dari adanya *gap* yang ditemukan yakni sebesar 21% sesuai dengan kelemahan yang terdapat pada variabel Perencanaan.

### Tanggapan Responden Mengenai Anggaran Berbasis Kinerja

Variable Perencanaan diukur dengan menggunakan 5 indikator dan dioperasionalkan menjadi 5 pernyataan yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Indikator yang diukur terdiri dari, Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi Yang Hendak Dicapai, Program, Kegiatan.

Secara keseluruhan tanggapan responden tentang perencanaan diperoleh total skor aktual sebesar 1013 (79%). Namun masih ada sebagian yang belum efektif dalam satuan kerja membuat suatu sasaran menetapkan target dan terukur sesuai dengan keiteria ssaran yang telah ditetapkan , hal ini terbukti dari adanya *gap* yang ditemukan yakni sebesar 21% sesuai dengan kelemahan yang terdapat pada variabel Anggaran Berbasis Kinerja.

### Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Kinerja

Variable Perencanaan diukur dengan menggunakan 3 indikator dan dioperasionalkan menjadi 3 pernyataan yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Indikator yang diukur terdiri dari, Efisiensi, Efektivitas, Outcome.

Secara keseluruhan tanggapan responden tentang perencanaan diperoleh total skor aktual sebesar 578 (74%). Namun masih ada sebagian yang masih kurang optimal dalam evaluasi terhadap ekonomi dan efisiensi masih belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan , hal ini terbukti dari adanya *gap* yang ditemukan yakni sebesar 26% sesuai dengan kelemahan yang terdapat pada variabel Akuntabilitas Kinerja.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji variabel non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 23, diperoleh hasil uji normalitas data adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

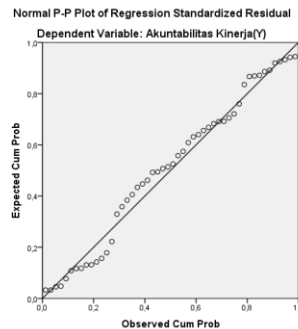
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,23686253
Most Extreme Differences	Absolute	,091
	Positive	,091
	Negative	-,077

Test Statistic	,091
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Berdasarkan tabel 3 hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) atau probabilitas sebesar  $0,200 > 0,05$  maka sapat disimpulkan bahwa nilai residual variabel Perencanaan, Anggaran Berbasis Kinerja Dan Akuntabilitas Kinerja berdistribusi normal. Hasil uji tersebut telah memenuhi asumsi normalitas dan selanjutnya dapat digunakan untuk analisis regresi yang memenuhi uji normalitas. Cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan cara melihat analisis grafik dari gambar normal *P-Plot of Regression* sebagai berikut :



**Gambar 1 Grafik Normalitas Data**

Pada Gambar 1 Jika residual dapat dilihat dari *P-Plot of Regresiion* terlihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal dan mengikuti garis diagonal sebagaimana dasar pengambilan keputusan maka dapat disimpulkan bahwa data dari populasi yang berdistribusi normalitas.

### Uji Multikoleniaritas

Mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas yaitu dengan melihat besaran dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan juga nilai Tolerance, dengan hasil adalah sebagai berikut :

**Tabel 4 Hasil Uji Multikoleniaritas**

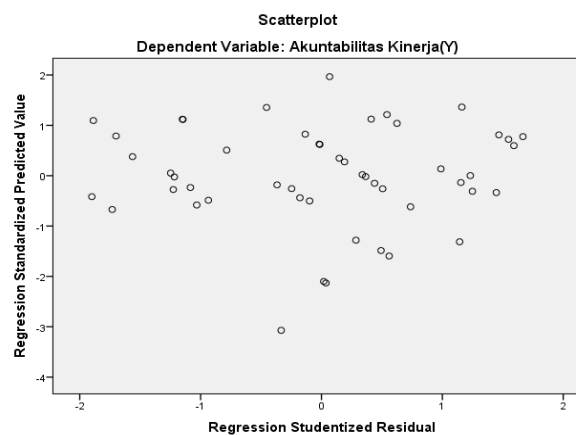
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Model			
1	(Constant)		
	Perencanaan(X1)	,836	1,196
	Anggaran Berbasis Kinerja(X2)	,836	1,196

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Berdasarkan hasil table 4 dapat dilihat bahwa *tolerance* untuk Perencanaan adalah 0,836 dengan nilai VIF 1,196 dan nilai *tolerance* Anggaran Berbasis Kinerja adlah 0,836 dengan VIF 1,196. Oleh karena itu tidak terdapat gejala multikolinearitas karena nilai VIF masing-masing variabel dibawah 0,10. Maka dapat disimpulkan uji multikolinearitas tidak terdapat gejala multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dapat dengan melihat grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED yaitu ada atau tidaknya pola tertentu. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

**Gambar 2 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan grafik hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa distribusi data tidak membentuk pola-pola tertentu dan titik-titik berada diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala teroskedastisitas.

### Regresi Linear Berganda

Dengan menggunakan program SPSS 23 for windows, didapat output nilai VIF untuk masing-masing variable bebas sebagai berikut :

**Tabel 5. uji multikolinearitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,400	2,309		1,473	,148			
	Perencanaan(X1)	,213	,102	,286	2,088	,042	,836	1,196	
	Anggaran Berbasis Kinerja(X2)	,233	,099	,323	2,352	,023	,836	1,196	

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja(Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Dari table 5 diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 1) Nilai konstanta 3,400, artinya jika Perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja bernilai nol (0), maka Akuntabilitas Kinerja akan bernilai 3,400. 2) Nilai koefisien regresi Perencanaan  $b_1 = 0,213$  menyatakan bahwa jika Perencanaan meningkat sebesar satu satuan dan variable lainnya konstan, maka Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 0,233 satuan.. 3) Nilai koefisien regresi Perencanaan  $b_2 = 0,233$  menyatakan bahwa jika Perencanaan meningkat sebesar satu satuan dan variable lainnya konstan, maka Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 0,233 satuan.

### Analisis Korelasi (*Person Product Moment*)

#### Analisis Korelasi Perencanaan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

**Tabel 6. hasil korelasi perencanaan dengan akuntabilitas kinerja**

		Correlations <sup>a</sup>	
		Perencanaan (X1)	Akuntabilitas Kinerja (Y)
Perencanaan (X1)	Pearson Correlation	1	,423**
	Sig. (2-tailed)		,002
	N	50	50
Akuntabilitas Kinerja (Y)	Pearson Correlation	,423**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	
	N	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Dari tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi untuk Perencanaan dengan Akuntabilitas Kinerja memiliki hubungan positif sebesar 0,423. Nilai tersebut termasuk dalam kategori skor interval 0,40-0,599. Data ini menunjukkan bahwa perencanaan memiliki hubungan sedang dengan akuntabilitas kinerja. Sehingga semakin baik perencanaan maka akan diikuti dengan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.

**Tabel 7. hasil korelasi anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja**

Correlations			
		Anggaran Berbasis Kinerja (X2)	Akuntabilitas Kinerja (Y)
Anggaran Berbasis Kinerja (X2)	Pearson Correlation	1	,432**
	Sig. (2-tailed)		,002
	N	50	50
Akuntabilitas Kinerja (Y)	Pearson Correlation	,432**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	
	N	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Dari tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi untuk Perencanaan dengan Akuntabilitas Kinerja memiliki hubungan positif sebesar 0,432. Nilai tersebut termasuk dalam kategori skor interval 0,40-0,599. Data ini menunjukkan bahwa perencanaan memiliki hubungan sedang dengan akuntabilitas kinerja. Sehingga semakin baik perencanaan maka akan diikuti dengan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.

### Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi (Uji  $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan.

**Tabel 8. koefisien determinasi perencanaan**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,423 <sup>a</sup>	,179	,162	1,863646

a. Predictors: (Constant), Perencanaan (X1)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Pada tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 0,179, maka nilai dipengaruhi nilai koefisien R Square (R Square) sebesar 0,179 atau 17,9% jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel perencanaan terhadap

akuntabilitas kinerja sebesar 0,179 (17,9%).

**Tabel 9. koefisien determinasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,432 <sup>a</sup>	,186	,169	1,854893

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja (X2)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Pada tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai koefisien dterminasi (R Square) adalah 0,186, maka nilai dipengaruhi nilai koefisien R Square (R Square) sebesar 0,186 atau 18,6% jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 0,186 (18,6%).

### Pengujian Hipotesis

Pengujian statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial adalah uji t. Dimana uraian pengujian hipotesis uji t untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

**Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,400	2,309		1,473	,148
	Perencanaan (X1)	,213	,102	,286	2,088	,042
	Anggaran Berbasis Kinerja(X2)	,233	,099	,323	2,352	,023

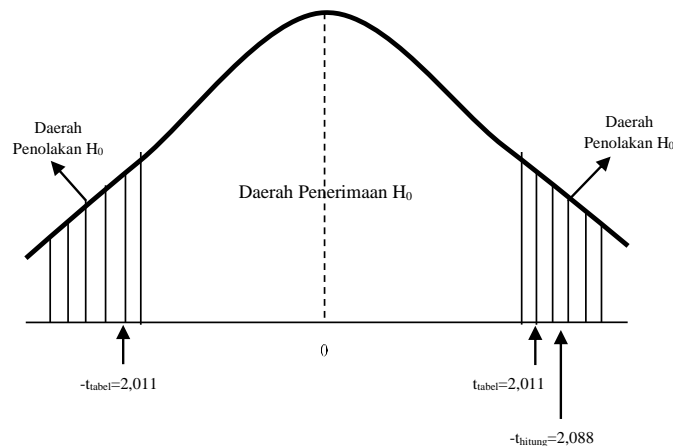
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja(Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

### Pengujian Hipotesis Perencanaan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan table 10, terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh Perencanaan (X1) sebesar 2,088. Tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 5% dan derajat kebebasan ( $v$ ) =  $n-k-1$  ( $50-2-1=47$ ) didapat nilai  $T_{tabel}$  2,011. Dengan ketentuan adalah sebagai berikut : Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak. Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima atau perencanaan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa

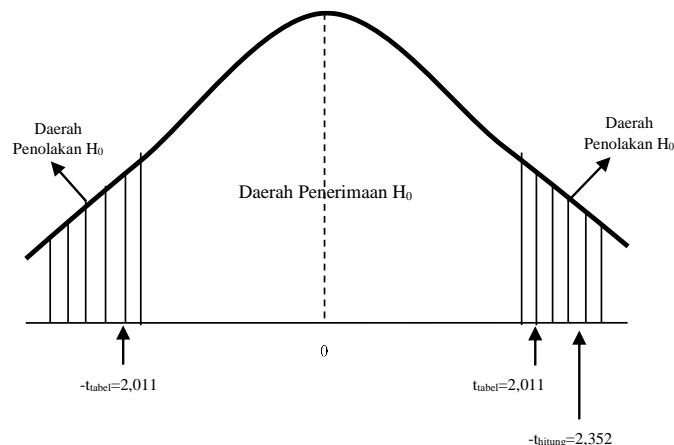
semakin tinggi perencanaan maka akuntabilitas kinerja akan ikut meningkat.



**Gambar 3 Grafik Uji Hipotesis Perencanaan Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

### Pengujian Hipotesis Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan table 10, terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh Anggaran Berbasis Kinerja (X2) sebesar 2,0352. Tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 5% dan derajat kebebasan ( $v$ ) =  $n-k-1$  ( $50-2-1=47$ ) didapat nilai  $T_{tabel}$  2,011. Dengan ketentuan adalah sebagai berikut : Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak. Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima atau perencanaan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi perencanaan maka akuntabilitas kinerja akan ikut meningkat.



**Gambar 4 Grafik Uji Hipotesis Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

### Pembahasan

#### Pengaruh Perencanaan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk Perencanaan sebesar 2,088 lebih besar dari  $t_{tabel}$  2,011. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi

uji statistik untuk Perencanaan sebesar 0,042. Sehingga Perencanaan (X1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung. Sesuai dengan teori Caroline (2019:154) yang menyatakan hubungan antara Perencanaan dan akuntabilitas kinerja bahwa Akuntabilitas kinerja juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian pula dengan pernyataan oleh Nursadi (2019:145) menyatakan bahwa penguatan sumber daya manusia aparatur perencanaan baik pusat maupun daerah, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diketahui pengaruh Perencanaan (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,179 atau 17,9%. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Perencanaan memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Winara dan Putri (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Kemudian yang dilakukan penelitian Syuliswati dan Asdani (2017) secara simultan faktor perencanaan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Selanjutnya penelitian ini juga didukung oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Cahya Budi (2020) hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perencanaan program dan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Perencanaan mempunyai presentase tanggapan responden sebesar 82% terdapat *gap* 18%, namun masih terdapat masalah dalam Perencanaan. Hal ini dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Kebijakan Yang Terbaik Untuk Merealisasikan Tujuan dengan presentase 79% terdapat *gap* sebesar 21% yang merupakan masalah yang ada pada Perencanaan. Selanjutnya Akuntabilitas Kinerja mempunyai presentase tanggapan responden sebesar 77% dan termasuk kedalam kategori baik, namun masih terdapat masalah dalam Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator *Efisiensi* sebesar 74% dan terdapat *gap* sebesar 26%. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Perencanaan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja, dimana semakin baik Perencanaan akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung.

Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya, masih terdapat temuan masalah pada evaluasi akuntabilitas kinerja masih menempati peringkat terendah, yang sepenuhnya berkaitan langsung dengan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti, dikarenakan hasil pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.

### **Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk Perencanaan



sebesar 2,352 lebih besar dari  $t_{tabel}$  2,011. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 0,023 sehingga Anggaran Berbasis Kinerja (X2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung. Sesuai dengan teori Pandapotan Ritonga (2021:120-121) yang mengatakan hubungan antara anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja mendukung tujuan dan kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja yang membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Demikian pula dengan pernyataan oleh Mujiburrahman (2017:42) menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka seharusnya laporan realisasi perhitungan APBD dilengkapi dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) sesuai dengan Inpres 7 tahun 1999.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diketahui pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,186 atau 18,6%. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Anggaran Berbasis Kinerja memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Wardani dan Silvia (2020) menyatakan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dengan menunjukkan hasil koefisien determinasi sebesar 63,4% sedangkan sisanya sebesar 36,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian peneliti yang dilakukan oleh Suhendar, Sari dan Nofitri (2021) sehingga dapat diartikan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya penelitian ini juga didukung oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Silvia (2021) berdasarkan hasil telah dipresentasikan anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LPMP Provinsi Lampung.

Berdasarkan dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai presentase tanggapan responden sebesar 81% dan termasuk dalam kategori sangat baik, namun masih terdapat *gap* 19%, dikarenakan masih terdapat masalah dalam Anggaran Berbasis Kinerja. Hal ini dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Sasaran dengan presentase 79% terdapat *gap* sebesar 21% yang merupakan masalah yang ada pada Anggaran Berbasis Kinerja. Selanjutnya Akuntabilitas Kinerja mempunyai presentase tanggapan responden sebesar 77% dan termasuk kedalam kategori baik, namun masih terdapat masalah dalam Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator *Efisiensi* sebesar 74% dan terdapat *gap* sebesar 26%. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja, dimana semakin baik Anggaran Berbasis Kinerja akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung.

Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya, bahwa pemerintah terus berusaha mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh instansi pemerintah. Hal itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi anggaran berbasis kinerja. Untuk mewujudkan efisiensi, bukan semata-mata memotong anggaran, tapi juga harus anggaran berbasis kinerja. Dimulai dengan memperbaiki pola penganggaran.

## 5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja, maka pada bagian akhir dari penelitian, penulis menarik kesimpulan Perencanaan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya bahwa apabila perencanaan semakin baik maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan begitu sebaliknya apabila perencanaan rendah maka akuntabilitas kinerja juga rendah. Hal itu terjadi karena penerapan Perencanaan masih belum optimal yang ditandai dengan tanggapan responden pada indikator Kebijakan yang masih rendah.

Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya bahwa apabila anggaran berbasis kinerja semakin baik maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan begitu sebaliknya apabila anggaran berbasis kinerja rendah maka akuntabilitas kinerja juga rendah. Hal itu terjadi karena penerapan pada Anggaran Berbasis Kinerja masih belum optimal yang ditandai dengan tanggapan responden pada indikator Sasaran yang masih rendah.

## REFERENSI

- Anggini, S. W., Rosidi, R., & Andayani, W. (2021). *The Moderating Role Of Change Management And Leadership Turnover: A Study Of Performance Accountability In Local*.
- Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 36-44.
- Arifin, A, N, D., Dkk. (2022) *Profesionalisme Kewirausahaan*. Zahir Publishing. Yogyakarta.
- Bambang Supriadi, S. E., & Roedjinandari, N. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Universitas Negeri Malang.
- Caroline, E. (2019). *Kajian dan Kebijakan Migrasi Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah*. Media Sahabat Cendekia.
- Ginanjari, D., Pasolo, F., Siahaya, A., & Saleh, K. (2019). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Poldap Papua). *The Journal of Business and Management Research*, 2(2), 224-232.
- Hermanto, C. B. (2020). *Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi,*

- Dan Pertanggungjawaban Anggaran Dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survey Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan. *Jurnal Akrab Juara*, 5(3), 40-56.
- Hoesada, J. (2022). Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis. Andi
- Isnanto, Y., Suharno, S., & Widarno, B. (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15.
- Jaelani, M. (2017). *Separuh Jalan Jejak Kinerja Anggota Dprd Kota Makassar Periode 2014-2019 (Vol. 1)*. Sah Media.
- Kurhayadi, H., Rohayati, Y., & Bambang Sucipto, M. M. (2020). *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi*. Insan Cendekia Mandiri.
- Kusno Hadiutomo, M.M. (2022) *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Dan Terdesentralisasi Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Deepublish.
- Nursadi, H. (Ed.). (2019). *Hukum Administrasi Negara Sektor*. Badan Penerbit FHUI.
- Riana Mayasari, (2021). *Buku Monograf Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Dan Model Penilaiannya*. Deepublish.
- Ritonga, P. (2021). *Keuangan Negara*. Penerbit Umsu Press.
- Rusdiana, A., & Nasihudin, N. (2021). *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendar, S., Sari, M. S., & Nofitri, R. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (Studi Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan). *Journal Of Accounting Taxing And Auditing (Jata)*, 2(1).
- Syuliswati, A., & Asdani, A. (2017). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Politeknik Negeri Malang. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (Abm)*, 24(1), 1-17.
- Wahdatul, L., Rahayu, S., & Dillak, V. J. (2016). Pengaruh Perencanaan Dan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. *Eproceedings Of Management*, 3(2).
- Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsur*, 6(1).
- Winara, P., & Putri, R. S. (2019). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Keuangan, Evaluasi Dan Tunjangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan

Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Sekretariat Bpsdm Perhubungan. *Methodika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 2(2), 186-202.